BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pendaftaran Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), yang beralamat di Jln.Tamansari No.55, Bandung.

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Dazxwaerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor: 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non struktural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti: IPTN, PJKA,ITB, dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun

1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang

Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA. sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

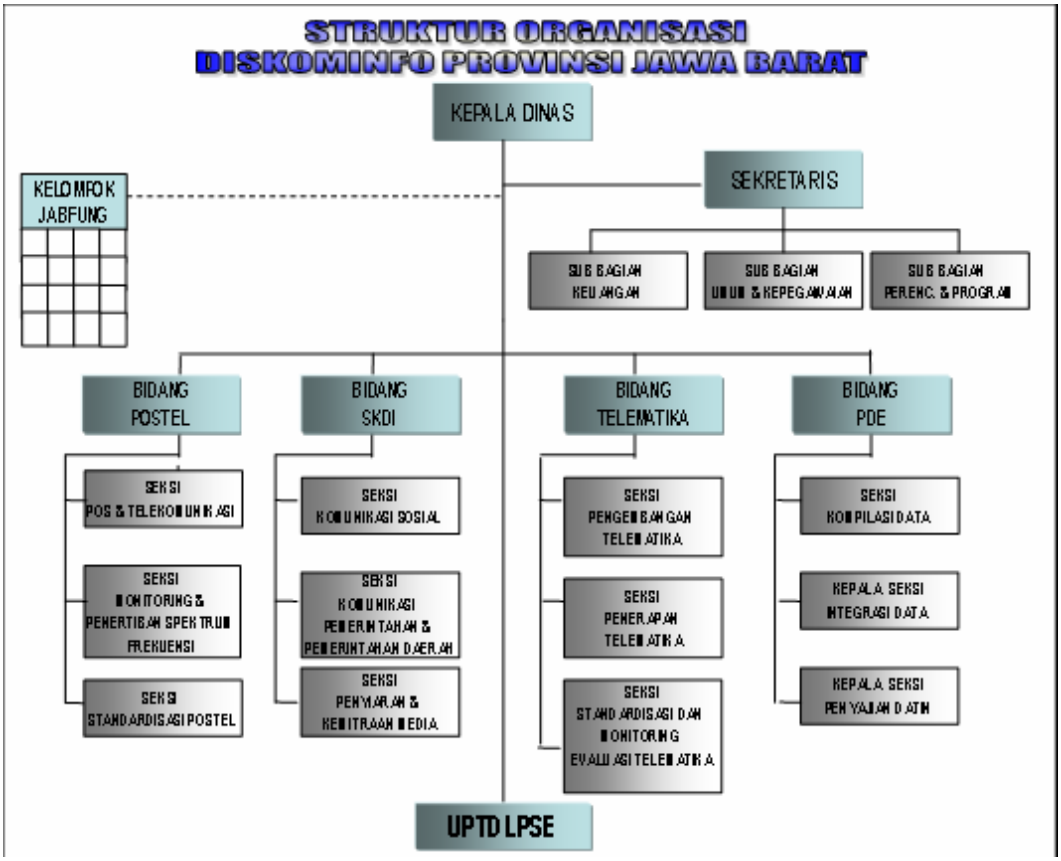
Visi

"Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien"

Misi

1. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalismesumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dantelekomunikasi
3. Mengoptimalkan pemanfaatan saranaKomunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakandiseminasi informasi
4. Mewujudkan layanan online dalampenyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkanpengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO

(Sumber:http://diskominfo.jabarprov.go.id)

3.1.4 Deskripsi Tugas

Tenaga Kerja merupakan sub faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan sebuah perusahaan. Tenaga Kerja tidak dapat terlepaskan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, karena suatu

perusahaan akan berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan proses kerjanya, Diskominfo terdiri dari Kepala Dinas dan Bidang-bidang lain dibawahnya.

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing jabatan yaitu:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika.
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.
d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

2. Sekretariat

Tugas Sekretariat :

a. Menyelenggarakan pengkajian program Dinas dan Sekretaris.
b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
d. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.
e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
f. Penyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat.
i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.
k. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat.
l. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sekretariat membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Program

(1) Melaksanakan penyusunan programkerja Sekretariatan dan Subbagian Perencanaan dan Program.
(2) Melaksanakan koordinasipenyusunan perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dantelekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik

(3) Melaksanakan penyusunan bahan RencanaStrategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ danLPPD Dinas.

(4) Melaksanakan penyusunan bahantelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakaan.

(5) Melaksanakan pelaporan danevaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program serta Dinas.

(6) Melaksanakan pengelolaan sisteminformasi bidang komunikasi dan informatika.

b. Subbagian Keuangan

1) Melaksanakan penyusunan DUKDA/DIKDA untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja rutin.
2) Melaksanakan kordinasi dalam penyusunan DUPDA/DIPDA untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja pembangunan.
3) Melaksanakan penyiapan daftar gaji, tunjangan, honorarium serta pembayaran lainnya.
4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja rutin.
5) Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran belanja rutin.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

1) Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
2) Melaksanakan penyiapan bahan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit.
3) Melaksanakan pengelolaan keprotokolan meliputi rapat dinas, upacara, pengaturan kunjungan tamu dinas dan rumah tangga Badan.
4) Melaksanakan pengelolaan administrasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventaris barang dan usulan penghapusan barang inventaris kantor.
5) Melaksanakan pengelolaan barang kantor dan jasa.
6) Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor dan barang inventaris kantor.
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas Bendaharawan Barang.

3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi

Tugasnya:

(1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. penyelengaaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi.

b. penyelengaraan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

c. penyelenggaraan fasilitas bidang pos dan telekomunikasi.

Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi :

a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi;

(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha jasa pos dan telekomunikasi;

(3) Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan usaha jasa pos dan telekomunikasi;

(4) Melaksanakan penyusunan bahan bimbinganteknis sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;

(5) Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum di daerah;

(6) Melaksanakan penyusunan bahansaranpertimbangan teknis perijinan RAPI dan ORARI di daerah.

b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja seksi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.
(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.
(3) Melaksanakan pengelolaan data pengguna spekrum frekuensi radio.
(4) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar pos.
(5) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar telekomunikasi.
(6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio;
(7) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengembalian kebijakan;
(8) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi

c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

(1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja seksi standarisasi pos dan telekomunikasi.
(2) Melaksanakan pengelolaan bahan kebijakan teknis standardisasi pos dan telekomunikasi.
(3) Melaksanakan bimbingan teknis standardisasi pos dan telekomunikas.;

(4) Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kantor cabang an loket pelayanan operator.

(5) Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi.

(6) Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan operator.

4. Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi

Tugasnya adalah :

(1) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

c. penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi membawahi :

a. Seksi Komunikasi Sosial

(1) Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial.

b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial.

b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah daerah

(1) Melaksanakan Penyusunan program Kerja Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Melaksanakan pengelolaan data Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan lembaga komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(5) Melaksanakan fasilitasi komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media

1) Melaksanakan menyusunan program kerja Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media.
2) Melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran.
3) Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan televise.
4) Melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan kesenian tradisional.
5) Melaksanakan penyusunan koordinasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media lainnya.
6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

4. Bidang Telematika

(1) Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Telematika mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika.

b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi telematika.

Bidang Telematika Membawahi :

a. Seksi Pengembangan Telematika

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Telematika

(2) Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang e-Government di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;

(3) Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan e-Government, Sistem Informasi, perangkat lunak dan konten serta e-Business.

(4) Melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan.

(5) Melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun.

(6) Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang e-business di Daerah.

b. Seksi Penerapan Telematika

(1) Melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika.

(2) Melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan telematika.

(3) Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia.

(4) Melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan telematika kepada perangkat daerah dan publik.

(5) Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur jaringan secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik.

(6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

(7) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penerapan telematika.

c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika.

(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika.

(3) Melaksanakan pelayanan informasi standardisasi sistem informasi dan telematika bagi perangkat daerah dan publik.

(4) Melaksanakan koordinasi penerapan standar nasional Indonesia lingkup aplikasi telematika.

(5) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi telematika.

(6) Melaksanakan cross sertifikasi, kerjasama standardisasi dan audit aplikasi telematika.

(7) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana standardisasi, sertifikasi dan audit aplikasi telematika.

(8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

(9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika.

5. Bidang Pengolahan Data Elektronik

Tugasnya adalah:

(1) Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan data elektronik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik.

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pengolahan data elektronik.

Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahi:

a. Seksi Kompilasi Data

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data.

(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data.

(3) Melaksanakan pengolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistim informasi kompilasi.

(4) Melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik.

(5) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik.

(6) Melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah.

(7) Melaksanakan fasilitasi kompilasi data.

(8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

(9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kompilasi data

b. Seksi Integrasi Data

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data.

(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Integrasi Data.

(3) Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas e-Government skala provinsi.

(4) Melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi.

(5) Melaksanakan menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi.

(6) Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas *Website*.

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi.

(2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data.

(3) Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi.

(4) Melaksanakan koordinasi pengelolaan internet public.

(5) Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk

(6) Melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id.

(7) Melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi.

(8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

(9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyajian data

6. Unit Pelaksana Teknik Dinas

Tugasnya :

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah atau penelitian dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh. Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, perlu adanya metode untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, maka diperlukan metode dan pengumpulan data.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kombinasi antara apa yang hendak diperoleh setelah melakukan penelitian (tujuan penelitian) dengan unsur-unsur penelitian. Desain penelitian dapat merupakan keterkaitan suatu desain dengan desain yang lain yang secara bersama-sama membentuk sebuah desain penelitian.

3.2.1.1 Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu penulis mengumpulkan data-data yang sedang terjadi sekarang, kemudian metode pengumpulan data dan untuk selanjutnya metode pengembangan sistem. Penelitian dengan metode deskriptif mempunyai langkah penting seperti berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
5. Menentukan kerangka berpikir.
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling

3.2.1.2. Metode *Action*

Metode *Action* atau tindakan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, cara pendekatan baru, atau produk pengetahuan yang baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia aktual (lapangan). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mempelajari situasi yang ada saat ini dengan tujuan untuk memperbaikinya.

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini di gunakan jenis dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam memperoleh data primer, metode pengumpulan data yang dapat digunakan adalah :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan dengan harapan bahwa keadaan yang sebenarnya dapat diketahui. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengamati cara kerja berdasarkan sistem yang sedang berjalan.

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan seksi penyajian data dan informasi serta ke seksi administratif kepegawaian umum yang ada kaitannya dengan sistem pendaftaran Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan orang lain. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku pustaka, jurnal penelitian ataupun media cetak atau elektronik. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh adalah buku pustaka, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian seperti faktur pembelian, nota penjualan dan catatan- catatan yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Adapun metode pendekatan dan pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis, yaitu:

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem yang penulis ambil adalah analisis dan perancangan berorientasi objek, digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan sub modul, perancangan berorientasi objek juga menunjukan hubungan elemen data dan elemen kontrol antara hubungan modulnya.

Model analisis harus dapat mencapai tiga sasaran utama, yaitu menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, membatasi serangkaian persyaratan yang dapat di*validasi* begitu perangkat lunak dibangun.

Dengan demikian perancangan berorientasi objek dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan sistem dipandang dari elemen data menggunakan alat bantu seperti : *Use case* Diagram merupakan kumpulan skenario yang mendeskripsikan hubungan antara para penguna sistem dengan sistem itu sendiri,dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. *Use case* diagram menampilkan relasi antara aktor dan *use case*. Diagram *class* digunakan untuk mendeskripsikan jenis-jenis obyek pada sebuah sistem dan hubungan yang terdapat diantara mereka. Diagram *class* juga menunjukkan properti dan operasi sebuah *class* dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan obyek tersebut. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara obyek di dalam dan di sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. *Activity* diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung proses paralel. *Deployment* diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dibangun dalam infrastruktur sistem, dimana komponen akan terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut,spesifikasi *server*, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah *node* adalah *server, workstation*, atau piranti keras lain yang digunakan untuk membangun komponen dalam lingkungan sebenarnya. Dengan kata lain diagram ini memperlihatkan pemetaan *software* kepada *hardware*.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode *prototype* sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi manajemen, tidak hanya sekedar suatu efolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Metode ini dikatakan revolusi karena merubah proses pengembangan sistem informasi yang lama (SDLC).

Menurut literatur, yang dimaksud dengan prototipe (*prototype*) adalah ”model pertama”, yang sering digunakan oleh perusahaan industri yang memproduksi barang secara masa. Tetapi dalam kaitannya dengan sistem informasi definisi kedua dari *Webster* yang menyebutkan bahwa ”*prototype is an individual that exhibits the essential peatures of later type*”, yang bila diaplikasikan dalam pengembangan sistem informasi manajemen dapat berarti bahwa *Prototype* tersebut adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. *Prototype* sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu.

Dalam beberapa hal pengembangan *software* berbeda dengan produk-produk manufaktur, setiap tahap atau fase pengembangan sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses yang harus dilakukan. Proses ini umumnya hanya untuk satu produk dan karakteristik dari produk tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti seperti produk

manufaktur, sehingga penggunaan"model pertama" bagi pengembangan s*oftware* tidaklah tepat. Istilah *prototyping* dalam hubungannya dengan pengembangan software sistem informasi manajemen lebih merupakan suatu proses bukan *prototype* sebagai suatu produk.

3.2.3.2.1 Karakteristik Metode *Prototype*

Ada empat langkah yang menjadi karakteristik metode *prototype* yaitu:

a. Pemilahan fungsi

Mengacu pada pemilahan fungsi yang harus ditampilkan oleh *prototype*. Pemilahan harus selalu dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh kasus yang akan diperagakan

b. Penyusunan Sistem Informasi

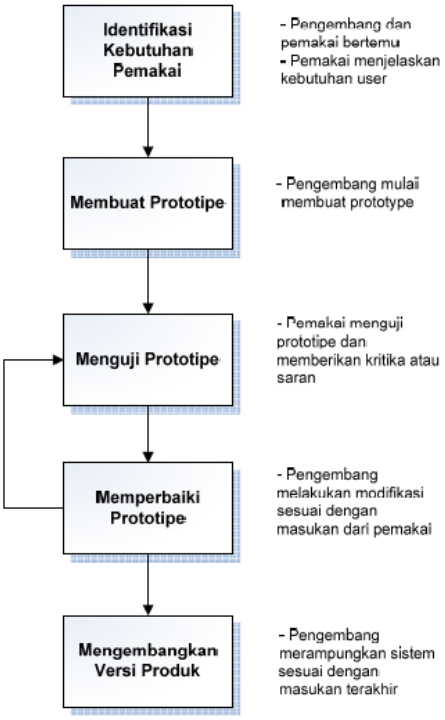
Bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya *prototype.*

c. Evaluasi

Bertujuan untuk mengevaluasi sistem yang dibuat.

d. Penggunaan Selanjutnya

Berkut adalah tahapan-tahapan dalam membuat sistem dengan menggunakan metode *Prototype*.



Gambar 3.2 Mekanisme pengembangan sistem dan *prototype*

(Sumber: Abdul Kadir,Pengenalan Sistem Informasi 2003,Andi: Yogjakarta)

Tahapan dalam metode *Prototype* :

1. Identifikasi kebutuhan (Data)

Penulis akan mengidentifikasikan semua kebutuhan *user* supaya penulis bisa merancang sistem yang akan dibangun sesuai dengan yang diharapkan *user*. Sebelum pada tahapan perancangan penulis akan memulai pada tahap awal terlebih dahulu yaitu penulis akan menganalisa sistem dengan cara melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian, interview, dan dengan cara literature yaitu dengan dokumentasi terhadap kebutuhan yang diinginkan user, baik dalam model *interface*, teknik, prosedural, maupun dalam teknologi yang akan digunakan.

2. Membangun *prototype*

a. Merancang sistem

Dalam tahap ini prototipe dirancang secara terstuktur dari proses basis data hingga rancangan menu program.

b. Mengkodekan sistem

Dalam tahap ini *prototype* yang sudah dirancang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.

3. Menguji sistem

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak, harus diuji dahulu sebelum digunakan.

4. Evaluasi Sistem

Penulis akan menentukan apakah sistem tang telah dibuat dapat diterima oleh user, atau harus dilakukan beberapa perbaikan. Setelah perbaikan sistem selesai dikerjakan , peulis akan kembali kepada tahap yang ketiga yaitu pengujian kembali.

5. Penerapan sistem

Setelah perangkat lunak yang telah diuji dan telah diterima oleh pemakai, maka perangkat lunak siap untuk diterapkan.

3.2.3.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan Sistem

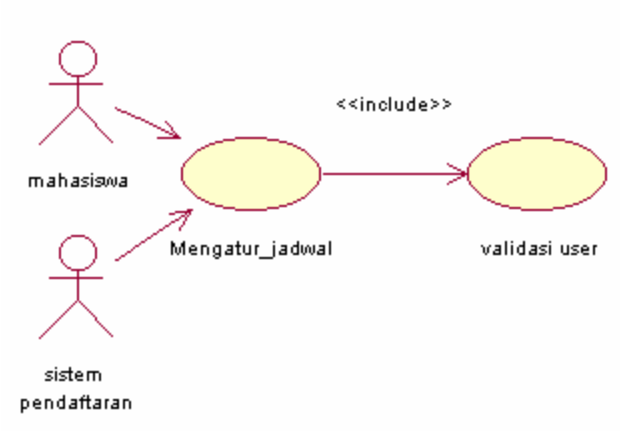
Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar

untuk merancang model sebuah sistem dengan berfokus pada objek UML. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefenisikan notasi dan syntax/simantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML *syntax* mendefenisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Penulis menggunakan beberapa jenis diagram, yaitu :

1) Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah "apa" yang diperbuat sistem, dan bukan "bagaimana". Sebuah *use case* merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.

Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. *Use case* digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di dalamnya.Aktor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke *use case*.



Gambar 3.3 *Use Case* Diagram

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

2) *Activity* diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

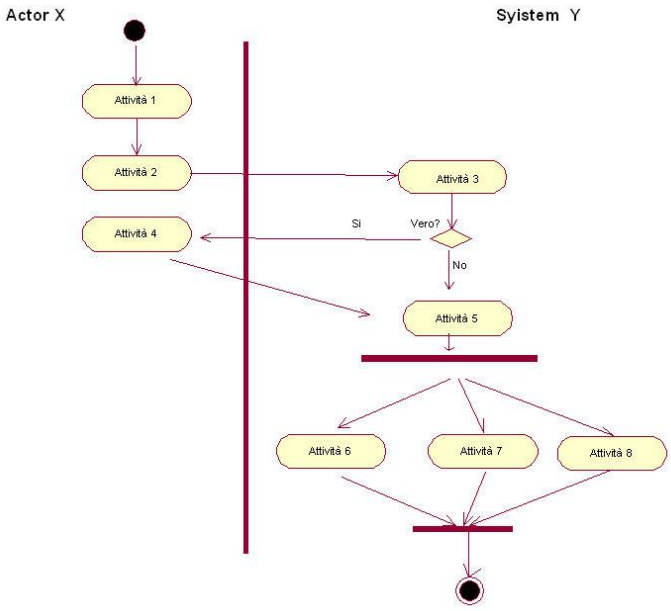
Diagram statechart terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Titik awal (*start*) merupakan awal dari suatu proses.

b. Aktivity menunjukkan aktivitas yang dilakukan.

c. *Transition* menunjukan alur perubahan dari satu activity ke activity yang lain.

d. Titik akhir (*end*) merupakan akhir dari suatu proses.



Gambar 3.4 *Activity* Diagram

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

4) *Sequence* diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu. *Sequence* diagram terdiri atar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).

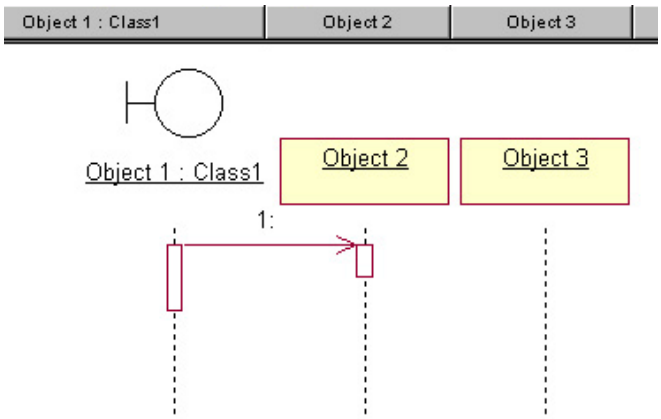
Diagram *sequence* terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Partisipan merupakan berbagai macam obyek dalam sistem.

b. Pesan dikirimkan dari partisipan satu ke partisipan yang lain

c. Aktivasi merupakan aktivitas yang dilakukaan oleh partisipan

d. Garis alir biasanya berbentuk garis putus-putus yang menghubungkam antara partisipan dengan aktivitas.

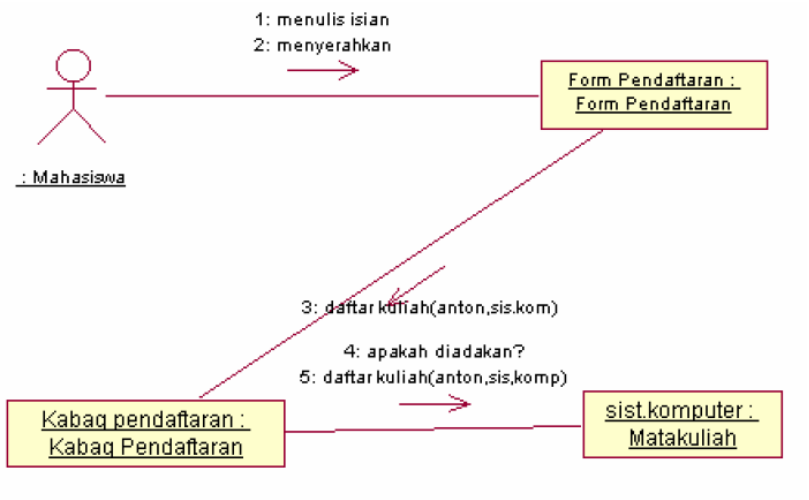


Gambar 3.5 *Sequence Diagram*

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

5) *Collaboration* diagram

Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian *message*. Setiap *message* memiliki *sequence* number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Messages dari level yang sama memiliki prefiks yang sama.



Gambar 3.6 *Collaboration* Diagram

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

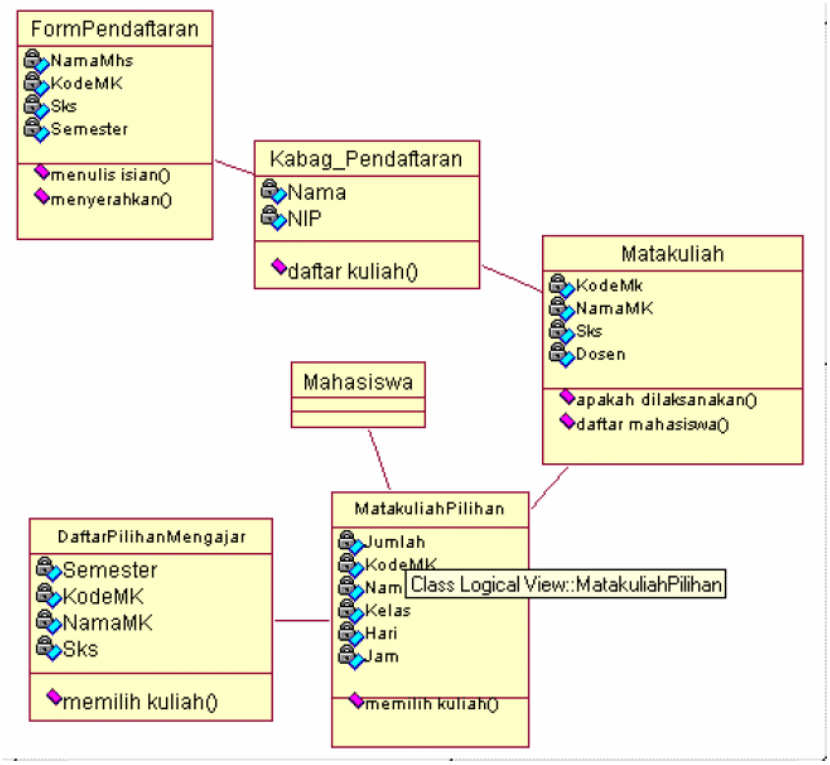
6) *Class* Diagram

Class Diagram digunakan untuk mendeskripsikan jenis-jenis obyek pada sebuah sistem dan hubungan yang terdapat diantara mereka. Diagram *class* juga menunjukkan properti dan operasi sebuah class dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan obyek tersebut. Diagram *class* terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Nama.

b. Atribut.

c. Metode/operation.



Gambar 3.7 Contoh Nama, Atribute dan Operasi

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin,mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

7) *Component* diagram

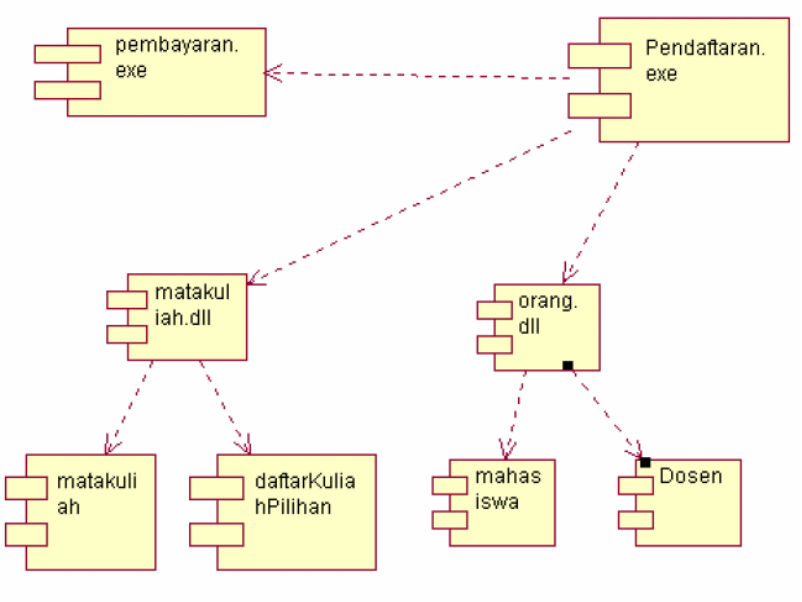
Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (*dependency*) di antaranya. *Component* diagram berisi:

a. Komponen

b. Antarmuka

c. *Dependency, generalisasi, asosiasi* dan *realisasi*

d. Paket, untuk mengelompokkan elemen-elemen model menjadi potongan-potongan besar.



Gambar 3.8 Component Diagram

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

8) *Deployment* Diagram

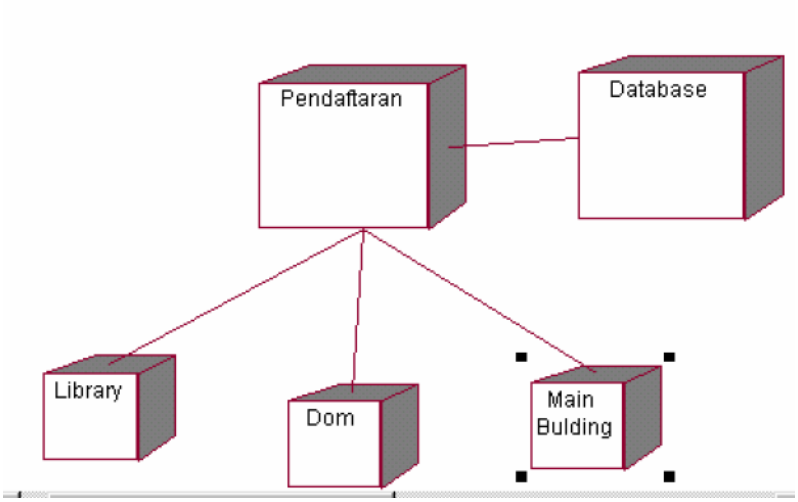
Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-*deploy* dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak (pada

mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, *spesifikasi server*, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. *Deployment* Diagram bisa juga berisi komponen-komponen, masing-masing komponen itu berada di suatu node, paket atau subsistem.Penggunaan model *deployment* yaitu:

a. Memodelkan *embedded system*

b. Memodelkan sistem *client/server*

c. Memodelkan sistem tersebar penuh



Gambar 3.9 *Deployment* Diagram

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

3.2.4 Pengujian Software

Pengujian prangkat lunak (*software*) merupakan proses menjalankan sejumlah program yang memiliki tujuan khusus untuk menemukan kesalahan pada sebuah perangkat lunak sebelum diserahkan kepada *end-user*. Pengujian atau testing *software* sangat penting untuk dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin kualitas *software* dan juga menjadi peninjauan terakhir terhadap spesifikasi *desain* dan pengkodean. Terdapat dua pendekatan dalam pengujian *software*, yaitu :

a. Pendekatan *black-box testing*

Menurut Roger S Pressmandalam bukunya Rekayasa Perangkat Lunak:

> *“ Pengujian Black – Box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian Black – Box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program ”*.

Faktor Pengujian Black Box :

1. *Reliability*

   Menekankan bahwa aplikasi akan dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode waktu tertentu. Pembetulan proses tersangkut kemampuan sistem untuk memvalidasi proses secara benar.

2. *Access control*

   Menekankan sumberdaya sistem harus dilindungi dari kemungkinan modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan dan prosedur keamanan harus dijalankan secara penuh untuk menjamin integritas data dan program aplikasi.

3. *Correctness*

Menjamin pada data yang dimasukkan, proses dan output yang dihasilkan dari aplikasi harus akurat dan lengkap.Kelengkapan dan akurasi akan dicapai melalui kontrol transaksi dan elemen data.

Pengujian *Black–Box* bukan merupakan alternative dari teknik *White–Box* , tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mamapu mengungkap kelas kesalahan daripada metode *White – Box*.

Pengujian *White – Box* berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut :

1. Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang

2. Kesalahan *interface*

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses *database external*

4. Kesalahan kinerja

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi